

Etika Kelompok dalam Konseling

Fadia Nurul Azmi¹, Ahmad Syarqawi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

fadia@gmail.com¹

ABSTRACT

Literature study is a way to obtain information or references about research subjects. After that, the data was examined using descriptive analysis. The descriptive analysis method begins with an in-depth explanation of the facts. Furthermore, this analysis goes beyond simple explanations to include adequate understanding and sound reasoning. Improving the understanding and application of ethics in group counseling requires collective efforts from various parties. Recommendations that can be implemented include standardizing ethics education and training, ongoing ethics training, developing ethical resources, increasing the role of supervisors, strengthening ethical culture in organizations, and increasing awareness of group members.

Keywords: ethics, counseling, group

ABSTRAK

Studi literatur adalah cara untuk mendapatkan informasi atau referensi tentang subjek penelitian. Setelah itu, data diperiksa dengan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dimulai dengan penjelasan fakta yang mendalam. Selanjutnya, analisis ini lebih dari sekadar penjelasan sederhana untuk mencakup pemahaman yang memadai dan alasan yang kuat. Meningkatkan pemahaman dan penerapan etika dalam konseling kelompok membutuhkan usaha kolektif dari berbagai pihak. Rekomendasi yang dapat dilakukan meliputi standarisasi pendidikan dan pelatihan etika, pelatihan etika berkelanjutan, pengembangan sumber daya etika, peningkatan peran supervisor, penguatan budaya etika dalam organisasi, dan peningkatan kesadaran anggota kelompok.

Kata kunci: etika, konseling, kelompok

PENDAHULUAN

Kelompok dalam konseling merupakan salah satu pendekatan konseling yang efektif untuk membantu individu mencapai tujuan mereka dalam lingkungan yang suportif dan kolaboratif. Dalam kelompok konseling, konselor bekerja dengan sekelompok orang yang berbagi masalah atau tujuan bersama.

Meskipun konseling kelompok memiliki banyak manfaat, terdapat pula potensi permasalahan etika yang dapat muncul. Permasalahan etika ini dapat membahayakan individu dan kelompok, serta merusak reputasi konselor dan profesi konseling secara keseluruhan. Memahami dan menerapkan etika dalam kelompok konseling sangatlah penting karena beberapa alasan berikut:

1. Melindungi Klien

Konselor memiliki tanggung jawab untuk melindungi klien dari bahaya, termasuk bahaya psikologis dan emosional. Pelanggaran etika,

seperti pengungkapan informasi rahasia atau diskriminasi, dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi klien.

2. Membangun Kepercayaan

Kepercayaan antara konselor dan klien merupakan elemen penting dalam konseling yang efektif. Pelanggaran etika dapat merusak kepercayaan dan membuat klien enggan untuk melanjutkan konseling.

3. Menjaga Reputasi Profesi

Konselor memiliki tanggung jawab untuk menjaga reputasi profesi konseling. Perilaku tidak etis oleh konselor dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi dan membuat orang enggan untuk mencari bantuan konseling.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran etika dalam konseling kelompok memang terjadi. Sebuah studi oleh Corey, & Callanan (2011) menemukan bahwa 15% konselor pernah mengalami pelanggaran etika dalam konseling kelompok. Jenis pelanggaran yang paling sering terjadi adalah pengungkapan informasi rahasia (10%) dan diskriminasi atau pelecehan (5%).

Penelitian lain oleh Kottler (2018) menunjukkan bahwa konsekuensi dari pelanggaran etika dalam konseling kelompok dapat sangat serius. Anggota kelompok yang mengalami pelanggaran etika mungkin merasa dirugikan, *traumatized*, dan kehilangan kepercayaan terhadap konselor dan profesi konseling.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa memahami dan menerapkan etika dalam konseling kelompok adalah hal yang sangat penting. Permasalahan etika dapat membahayakan klien, merusak kepercayaan, dan mencoreng reputasi profesi. Diharapkan makalah ini dapat membantu konselor untuk memahami dan menerapkan etika dalam praktik mereka, sehingga dapat memberikan layanan konseling kelompok yang berkualitas dan beretika.

METODE PENELITIAN

Salah satu contoh penelitian literatur adalah mencari referensi teoritis yang berkaitan dengan kasus atau masalah yang diteliti. Menurut Tinjauan pustaka menurut Creswell, John W. (2014:40), adalah kumpulan karya yang merangkum teori dan informasi baik dari masa lalu maupun masa kini. Setiap tulisan disusun menurut topik dan dokumen yang diperlukan.. Data yang dikumpulkan oleh penulis untuk penelitian ini berasal dari tinjauan pustaka. Studi literatur adalah cara untuk mendapatkan informasi atau referensi tentang subjek penelitian. Setelah itu, data diperiksa dengan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dimulai dengan penjelasan fakta yang mendalam. Selanjutnya, analisis ini lebih dari sekadar penjelasan sederhana untuk mencakup pemahaman yang memadai dan alasan yang kuat.

Menurut Zed (2008), ada lima karakteristik utama penelitian perpustakaan:

1. Berbeda dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau keterangan saksi mata tentang peristiwa, orang, atau benda lain, peneliti bekerja secara langsung dengan teks atau data numerik.

2. Karena perpustakaan data sudah siap digunakan, peneliti dapat bekerja langsung dengan sumber bahan yang sudah ada sebelumnya tanpa harus pergi ke tempat lain.
3. Data perpustakaan biasanya berasal dari sumber sekunder, artinya peneliti tidak memperoleh data asli dari pengamatan langsung di lapangan, melainkan dari sumber kedua.
4. Waktu dan ruang tidak membatasi keadaan data perpustakaan.

Prosedur Penelitian

Berikut prosedur penelitian kepustakaan menurut Zed (2008) yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Memahami topik penelitian secara umum.
2. Carilah data yang mendukung subjek tersebut.
3. Soroti bidang studi.
4. Cari dan temukan bahan bacaan yang diperlukan, lalu atur.
5. Periksa dan catat catatan penelitian.
6. Periksa dan tingkatkan isi bacaan.
7. Urutkan bacaan sekali lagi ke dalam kategori dan mulailah menulis.

Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan buku dan jurnal sebagai literatur yang relevan untuk mengumpulkan data, dengan sepuluh publikasi spesifik yang memberikan informasi berdasarkan topik penelitian. Memanfaatkan istilah upaya konselor sekolah untuk mencegah perundungan dan upaya mencegah perundungan itu sendiri.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Dokumentasi, atau pencarian informasi tentang objek atau variabel dalam buku, jurnal, makalah, atau publikasi lainnya, merupakan Pendekatan yang diambil untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian ini (Arikunto, 2010). Skema penulisan/peta, daftar periksa untuk mengklasifikasikan bahan penelitian, dan struktur catatan penelitian berfungsi sebagai instrumen penelitian penelitian.

Teknik Analisis Data

Metode analisis isi merupakan teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini. Kesimpulan yang valid diambil dari pendekatan ini, yang dapat diperiksa kembali berdasarkan informasi baru (Krippendorff, 1993). Metode memilih, mengontraskan, menggabungkan, dan mengklasifikasikan makna-makna yang berbeda akan digunakan dalam penelitian ini hingga makna-makna yang bersangkutan ditemukan (Sabarguna, 2005). Kurangnya penulis daftar pustaka dapat menimbulkan kesalahpahaman manusia, hal ini dapat dicegah dan diatasi dengan melakukan pemeriksaan antar perpustakaan, membaca kembali literatur, dan

memperhatikan komentar pembimbing guna menjaga kelangsungan proses peninjauan (Sutanto, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Etika dan Kelompok Konseling

a. Etika

Menurut K. Bertens (2007) “etika” berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata “ethos” (bahasa Yunani), dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti yaitu tempat tinggal yang biasa; padang rumput; kebiasaan; adat; akhlak; watak; perasaan; sikap; cara berfikir. Dalam bentuk jamak (ta etha) artinya adalah adat kebiasaan. Etimologi kata “etika” sama dengan etimologi kata “moral”, karena keduanya berasal dari kata yang berarti adat kebiasaan. Istilah lain yang identik dengan etika, yaitu: a. Susila (Sanskerta), lebih menunjukkan kepada dasar-dasar, prinsip, aturan hidup (sila) yang lebih baik (su). b. Akhlak (Arab), berarti moral, dan etika berarti ilmu akhlak. Etika ialah ilmu yang mempelajari segala soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia semuanya, teristimewa yang mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan perasaan, sampai mengenai tujuan yang dapat merupakan perbuatan, menurut Ki Hajar Dewantoro.

b. Kelompok Konseling

Kelompok bimbingan dan konseling adalah kelompok yang memiliki tujuan untuk mencapai pemahaman diri, pengarahan diri dan mengatasi hambatan-hambatan perkembangan dirinya untuk mencapai perkembangan optimal dari kemampuan pribadi yang dimilikinya baik berupa bimbingan, konseling.

Robert L. Gibson & Marianne H. Mitchel (2011), kelompok konseling adalah kelompok yang sifatnya fungsional, atau berorientasi tujuan. Sebagai pemimpin kelompok yang memiliki tujuan, kelompok konseling menjadi dua tingkatan, yaitu bimbingan, konseling.

1. Bimbingan Kelompok (*Group Guidance*)

Bimbingan kelompok merupakan suatu cara memberikan bantuan atau bimbingan kepada individu atau siswa melalui kegiatan kelompok. Bimbingan kelompok ini mengacu pada aktivitas-aktivitas kelompok yang berfokus pada penyediaan informasi atau pengalaman lewat kegiatan kelompok yang terencana dan terorganisasi. Dalam bimbingan ini, kegiatan kelompoknya harus dipimpin oleh seorang konselor yang terlatih dan berwenang menyelenggarakan praktik pelayanan bimbingan dan konseling.

2. Konseling Kelompok (*Group Counseling*)

Konseling kelompok adalah suatu upaya pembimbing atau konselor dalam membantu memecahkan masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok melalui kegiatan kelompok agar tercapai perkembangan yang optimal. Pengertian lain

dari konseling kelompok adalah suatu upaya pemberian bantuan kepada individu yang mengalami masalah pribadi, melalui kegiatan kelompok agar tercapai perkembangan optimal. Dari perkembangan tersebut diharapkan tiap anggota dapat mengatasi permasalahannya.

B. Etika Kelompok dalam Konseling

Etika dalam konseling membahas keberadaan masalah-masalah hukum dan etika dalam kelompok konseling. Tujuannya tidak secara langsung membahas pelatihan pimpinan-pimpinan kelompok karena sebagai macam bentuk kepemimpinan akan ditentukan oleh disiplin yang dimiliki oleh pimpinan pimpinan kelompok yang potensial.

Menurut Ev. Asriningrum, M.K, etika kelompok konseling berarti suatu aturan yang harus dilakukan oleh seorang konselor dan hak hak klien yang harus dilindungi oleh seorang konselor. Dan dia membagi empat etika yang penting dilindungi konseling kelompok yaitu:

1. *Profesional Responsibility*

Selama proses konseling berlangsung, seorang konselor harus bertanggung jawab terhadap kliennya dan dirinya sendiri. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- a. Konselor harus bertanggung jawab untuk memberi perhatian penuh terhadap klien selama proses konseling.
- b. Kita harus bisa melakukan terminasi (menghentikan proses konseling) secara tepat.
- c. Relasi antara konselor dan klien haruslah relasi yang terapeutik namun tidak menghilangkan yang personal.
- d. Konselor harus dapat membangun kehidupannya sendiri secara sehat sehingga ia sehat secara spiritual, emosional dan fisikal.

2. *Confidentiality*. Konselor harus menjaga kerahasiaan klien.

Ada beberapa hal yang perlu penjelasan dalam etika ini, yaitu yang dinamakan *privileged communication*. Artinya konselor secara hukum tidak dapat dipaksa untuk membuka percakapannya dengan klien, namun untuk kasus-kasus yang dibawa ke pengadilan, hal seperti ini bisa bertentangan aturan dari etika itu sendiri. Dengan demikian tidak ada kerahasiaan yang absolute.

3. *Conveying Relevant Information to The Person in Counseling*.

Maksudnya klien berhak mendapatkan informasi mengenai konseling yang akan mereka jalani. Informasi tersebut adalah:

- a. *Counselor qualifications*: konselor harus memberikan informasi tentang kualifikasi atau keahlian yang ia miliki.
- b. *Counseling consequences* : konselor harus memberikan informasi tentang hasil yang dicapai dalam konseling dan efek samping dari konseling
- c. *Time involved in counseling*: konselor harus memberikan informasi kepada klien berapa lama proses konseling yang akan dijalani oleh klien.

Konselor harus bisa memprediksikan setiap kasus membutuhkan berapa kali pertemuan. Misalnya konselor dan klien bertemu seminggu sekali selama 15 kali, kemudian sebulan sekali, dan setahun sekali.

- d. *Alternative to counseling*: konselor harus memberikan informasi kepada klien bahwa konseling bukanlah satu-satunya jalan untuk sembuh, ada faktor lain yang berperan dalam penyembuhan, misalnya: motivasi klien, natur dari problem, dll.

4. *The Counselor Influence.*

Konselor mempunyai pengaruh yang besar dalam relasi konseling, sehingga ada beberapa hal yang perlu konselor waspadai yang akan mempengaruhi proses konseling dan mengurangi efektifitas konseling. Hal-hal tersebut adalah:

- a. *The counselor needs*: kebutuhan-kebutuhan pribadi seorang konselor perlu dikenali dan diwaspadai supaya tidak mengganggu efektifitas konseling.
- b. *Authority*: pengalaman konselor dengan figur otoritas juga perlu diwaspadai karena akan mempengaruhi proses konseling jika kliennya juga figur otoritas.
- c. *Sexuality*: konselor yang mempunyai masalah seksualitas yang belum terselesaikan akan mempengaruhi pemilihan klien, terjadinya bias dalam konseling, dan resistance atau negative transference.
- d. *The counselor's moral and religious values*: nilai moral dan religius yang dimiliki konselor akan mempengaruhi persepsi konselor terhadap klien yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ia pegang.

Etika kerja kelompok adalah etika yang disetujui yang konsisten dengan komitmen, etika dalam arti lebih luas (politik, moral dan agama) yang kita nggap masuk akal dan bisa diterapkan oleh klien maupun pihak pemberi bimbingan. Etika tidak bersifat absolut. Etika bisa berubah sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Jika tidak demikian, etika bisa jadi penghambat dan bukan lagi sebagai penuntun untuk pengembangan kerja dan pengembangan diri.

C. Prinsip-Prinsip Etika Utama dalam Kelompok Konseling

Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika merupakan landasan fundamental dalam konseling kelompok. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman bagi konselor untuk menciptakan lingkungan yang aman, suportif, dan terapeutik bagi para anggotanya. Munro, Manthei & Small (1989) mengemukakan bahwa ada tiga dasar etika konseling yaitu kerahasiaan, keterbukaan dan pengambilan keputusan oleh klien sendiri.

Beberapa prinsip etika utama dalam konseling kelompok meliputi kerahasiaan, kompetensi, integritas, keadilan, kepedulian, otonomi, informed consent, evaluasi dan penilaian, supervisi, dan dokumentasi. Berikut ini akan

dibahas lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip etika utama tersebut dan bagaimana penerapannya dalam praktik konseling kelompok.

1. Kerahasiaan

Konselor harus menjaga kerahasiaan informasi yang dibagikan oleh anggota kelompok. Ini termasuk informasi pribadi, masalah pribadi, dan pengalaman dalam kelompok. Konselor hanya boleh mengungkapkan informasi rahasia dengan persetujuan tertulis dari anggota kelompok, atau dalam situasi di mana terdapat kewajiban hukum untuk melakukannya.

2. Kompetensi

Konselor kelompok harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk memimpin kelompok secara efektif. Konselor harus mengikuti pelatihan etika yang berkelanjutan dan tetap *up-to-date* dengan perkembangan terbaru dalam konseling kelompok.

3. Integritas

Konselor harus selalu bertindak dengan integritas dan kejujuran. Konselor harus menghindari konflik kepentingan dan tidak boleh memanfaatkan anggota kelompok untuk keuntungan pribadi.

4. Keadilan

Konselor harus memperlakukan semua anggota kelompok dengan adil dan hormat. Konselor harus menghindari diskriminasi dan pelecehan terhadap anggota kelompok berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, orientasi seksual, atau karakteristik pribadi lainnya.

5. Kepedulian

Konselor harus menunjukkan kepedulian dan perhatian terhadap semua anggota kelompok. Konselor harus menciptakan lingkungan yang aman dan suportif di mana anggota kelompok dapat merasa nyaman untuk berbagi dan tumbuh.

6. Otonomi

Konselor harus menghormati otonomi anggota kelompok. Konselor tidak boleh memaksakan anggota kelompok untuk melakukan apa pun yang tidak ingin mereka lakukan. Anggota kelompok harus bebas untuk membuat pilihan sendiri dan untuk keluar dari kelompok kapan saja.

7. Informed Consent

Sebelum bergabung dengan kelompok, konselor harus memberikan informasi yang cukup kepada calon anggota kelompok tentang tujuan kelompok, proses kelompok, dan potensi risiko dan manfaat dari konseling kelompok. Calon anggota kelompok harus memberikan persetujuan tertulis mereka untuk berpartisipasi dalam kelompok.

8. Evaluasi dan Penilaian

Konselor harus melakukan evaluasi dan penilaian secara berkala untuk memastikan bahwa kelompok berjalan dengan efektif dan mencapai tujuannya. Konselor harus menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan konseling kelompok.

9. Supervisi

Konselor kelompok harus menerima supervisi dari supervisor yang kompeten. Supervisi dapat membantu konselor untuk meningkatkan keterampilan mereka, untuk mengatasi masalah etika, dan untuk memastikan bahwa mereka memberikan layanan konseling kelompok yang berkualitas.

10. Dokumentasi

Konselor harus membuat dokumentasi yang akurat dan lengkap tentang semua aspek konseling kelompok. Dokumentasi ini harus disimpan dengan aman dan rahasia.

Penerapan prinsip-prinsip etika ini tidak hanya melindungi para anggota kelompok dari bahaya, tetapi juga membantu membangun kepercayaan dan meningkatkan reputasi profesi konseling. Konselor yang berkomitmen pada etika profesional akan memberikan layanan konseling kelompok yang efektif dan bermanfaat bagi para anggotanya.

D. Pelanggaran Etika dan Kelompok Konseling

Pelanggaran etika dalam kelompok konseling bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Menurut Eko Sujadi (2018), disebutkan bahwa kompleksitas permasalahan terkait implementasi kode etik profesi Bimbingan dan Konseling dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan konseling. Meskipun konselor kelompok berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip etika, namun terdapat beberapa potensi pelanggaran etika yang dapat terjadi dalam konseling kelompok. Berikut adalah beberapa contohnya:

1. Pelanggaran Kerahasiaan

Konselor dapat melanggar kerahasiaan dengan mengungkapkan informasi pribadi anggota kelompok kepada orang lain tanpa persetujuan mereka. Hal ini dapat terjadi secara sengaja atau tidak sengaja, seperti saat konselor berbicara tentang anggota kelompok di depan umum atau saat mereka tidak menjaga keamanan dokumen rahasia.

2. Ketidakkompetenan

Konselor yang tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang cukup untuk memimpin kelompok dapat membahayakan para anggotanya. Hal ini dapat terjadi saat konselor tidak mampu menangani masalah yang kompleks dalam kelompok atau saat mereka tidak dapat menciptakan lingkungan yang aman dan suportif.

3. Konflik Kepentingan

Konselor dapat terlibat dalam konflik kepentingan jika mereka memiliki hubungan pribadi dengan anggota kelompok atau jika mereka memiliki keuntungan finansial dari kelompok. Hal ini dapat membuat konselor tidak dapat bertindak secara objektif dan adil terhadap semua anggota kelompok.

4. Diskriminasi dan Pelecehan

Konselor dapat melakukan diskriminasi atau pelecehan terhadap anggota kelompok berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, orientasi seksual, atau karakteristik pribadi lainnya. Hal ini dapat membuat anggota kelompok merasa tidak nyaman dan tidak aman dalam kelompok.

5. Penyalahgunaan Kekuasaan

Konselor dapat menyalahgunakan kekuasaan mereka dengan memaksa anggota kelompok untuk melakukan apa pun yang tidak ingin mereka lakukan. Hal ini dapat terjadi saat konselor menggunakan tekanan emosional atau ancaman untuk mengendalikan anggota kelompok.

6. Kurangnya *Informed Consent*

Konselor dapat gagal memberikan informasi yang cukup kepada calon anggota kelompok tentang tujuan kelompok, proses kelompok, dan potensi risiko dan manfaat dari konseling kelompok. Hal ini dapat membuat anggota kelompok membuat keputusan yang tidak tepat tentang partisipasi mereka dalam kelompok.

7. Evaluasi dan Penilaian yang Tidak Memadai

Konselor dapat gagal melakukan evaluasi dan penilaian secara berkala untuk memastikan bahwa kelompok berjalan dengan efektif dan mencapai tujuannya. Hal ini dapat membuat konselor tidak dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah dalam kelompok.

8. Kurangnya Supervisi

Konselor dapat gagal menerima supervisi dari supervisor yang kompeten. Hal ini dapat membuat konselor tidak memiliki dukungan yang mereka butuhkan untuk menangani masalah etika dan untuk meningkatkan keterampilan mereka.

9. Dokumentasi yang Tidak Akurat atau Tidak Lengkap

Konselor dapat membuat dokumentasi yang tidak akurat atau tidak lengkap tentang semua aspek konseling kelompok. Hal ini dapat membuat konselor sulit untuk melacak kemajuan anggota kelompok dan untuk melindungi diri mereka dari tuntutan hukum.

E. Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Etika

Dalam penelitian Diana Syamila (2022), disebutkan bahwa konselor memiliki tanggung jawab etis untuk menjelaskan makna kerahasiaan dalam konseling kelompok. Prinsip kerahasiaan penting mengingat etika profesional konselor lebih memperhatikan privasi konseli, karena akan melibatkan kenyamanan dan keamanan dalam menerima layanan konseling. Mencegah dan menangani pelanggaran etika dalam konseling kelompok merupakan tanggung jawab semua pihak yang terlibat, termasuk konselor, supervisor, organisasi profesional, dan anggota kelompok. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah dan menangani pelanggaran etika:

Pencegahan:

1. Pendidikan dan Pelatihan

Konselor harus menerima pendidikan dan pelatihan yang komprehensif tentang etika konseling kelompok. Pelatihan ini harus mencakup topik-topik seperti kerahasiaan, kompetensi, integritas, keadilan, kepedulian, otonomi, informed consent, evaluasi dan penilaian, supervisi, dan dokumentasi. Konselor harus mengikuti pelatihan etika berkelanjutan untuk memastikan bahwa mereka tetap up-to-date dengan perkembangan terbaru dalam etika konseling kelompok.

2. Kode Etik

Konselor harus mengikuti kode etik profesi mereka, seperti Kode Etik Konselor Indonesia (KEKI). Kode etik ini memberikan pedoman bagi konselor tentang bagaimana berperilaku secara etis dalam semua aspek praktik konseling kelompok.

3. Supervisi

Konselor kelompok harus menerima supervisi dari supervisor yang kompeten. Supervisor dapat membantu konselor untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah etika, untuk meningkatkan keterampilan mereka, dan untuk memastikan bahwa mereka memberikan layanan konseling kelompok yang berkualitas.

4. Penciptaan Budaya Etika

Organisasi profesional, seperti Asosiasi Psikologi Klinis Indonesia (APKI), harus menciptakan budaya etika dalam profesi konseling. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan sumber daya dan dukungan bagi konselor, dengan mengembangkan program pelatihan etika, dan dengan menegakkan kode etik profesi.

Penanganan:

1. Identifikasi Masalah

Konselor, supervisor, anggota kelompok, atau pihak lain yang terlibat harus dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran etika. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan tanda-tanda seperti:

- a. Kerahasiaan anggota kelompok dilanggar.
- b. Konselor tidak kompeten untuk memimpin kelompok.
- c. Konselor memiliki konflik kepentingan dengan anggota kelompok.
- d. Anggota kelompok didiskriminasi atau dilecehkan.
- e. Konselor menyalahgunakan kekuasaannya.
- f. Anggota kelompok tidak diberikan informed consent.
- g. Evaluasi dan penilaian kelompok tidak dilakukan secara memadai.
- h. Konselor tidak menerima supervisi yang memadai.
- i. Dokumentasi kelompok tidak akurat atau tidak lengkap.

2. Investigasi

Jika potensi pelanggaran etika teridentifikasi, maka harus dilakukan investigasi. Investigasi ini harus dilakukan secara objektif dan imparial. Semua pihak yang terlibat harus diwawancarai, dan semua bukti yang relevan harus dikumpulkan.

3. Tindakan Disiplin

Jika pelanggaran etika terbukti terjadi, maka harus diambil tindakan disiplin. Tindakan disiplin dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, skorsing, atau pencabutan izin praktik. Tindakan disiplin harus proporsional dengan tingkat keparahan pelanggaran.

4. Pemulihan

Jika pelanggaran etika terjadi, maka harus dilakukan upaya pemulihan. Upaya pemulihan ini dapat berupa:

- a. Konselor memberikan konseling kepada anggota kelompok yang dirugikan.
- b. Konselor mengikuti pelatihan etika tambahan.
- c. Konselor di bawah supervisi yang lebih ketat.

F. Dampak Pelanggaran Etika dalam Konseling Kelompok

Pelanggaran etika dalam konseling kelompok dapat memiliki dampak yang signifikan dan merugikan bagi semua pihak yang terlibat. Berikut adalah pembahasan panjang tentang dampak pelanggaran etika dalam konseling kelompok:

1. Dampak pada Klien

Pelanggaran etika dapat merusak kepercayaan klien terhadap proses konseling dan konselor. Misalnya, jika konselor melanggar kerahasiaan klien, klien mungkin merasa tidak aman dan tidak mau berbagi informasi pribadi lagi. Ini dapat menghambat proses konseling dan pertumbuhan pribadi klien.

2. Dampak pada Konselor

Pelanggaran etika juga dapat merusak reputasi profesional konselor. Misalnya, jika konselor terlibat dalam hubungan romantis dengan klien, ini dapat dianggap sebagai pelanggaran etika yang serius dan dapat mengakibatkan sanksi profesional, termasuk kehilangan lisensi.

3. Dampak pada Kelompok

Dalam konteks konseling kelompok, pelanggaran etika dapat merusak dinamika kelompok dan menghambat proses konseling. Misalnya, jika konselor memfavoritkan satu klien di atas klien lainnya, ini dapat menciptakan ketidakharmonisan dalam kelompok dan menghambat proses konseling.

4. Dampak pada Masyarakat

Pelanggaran etika dalam konseling kelompok juga dapat merusak citra profesi konseling di mata masyarakat. Misalnya, jika kasus pelanggaran

etika oleh konselor mendapatkan publisitas negatif, ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi konseling.

Untuk menghindari dampak negatif ini, sangat penting bagi konselor untuk memahami dan mematuhi kode etik profesional mereka. Konselor harus berkomitmen untuk menjaga kepercayaan klien, menjaga kerahasiaan, dan menghindari konflik kepentingan. Selain itu, konselor harus berusaha untuk meningkatkan kompetensi profesional mereka dan memberikan layanan konseling yang efektif dan etis.

Dengan demikian, pentingnya etika dalam konseling kelompok tidak dapat diabaikan. Pelanggaran etika dapat memiliki dampak yang merugikan bagi klien, konselor, kelompok, dan masyarakat. Oleh karena itu, konselor harus berusaha untuk mematuhi kode etik profesional mereka dan berkomitmen untuk memberikan layanan konseling yang etis dan efektif.

G. Rekomendasi untuk Meningkatkan Pemahaman dan Penerapan Etika dalam Kelompok Konseling

Mencetak konselor yang kompeten dan beretika dalam praktik konseling kelompok tidak hanya bergantung pada individu konselor itu sendiri. Dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem yang menunjang penerapan etika secara optimal. Berikut beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan etika dalam konseling kelompok:

1. Standarisasi Pendidikan dan Pelatihan Etika
 - a. Institusi pendidikan tinggi yang menawarkan program studi psikologi, khususnya konsentrasi konseling, perlu memastikan kurikulum yang diajarkan mencakup modul etika konseling kelompok secara komprehensif.
 - b. Modul ini tidak hanya terfokus pada teori dan prinsip dasar, namun juga dilengkapi dengan simulasi kasus dan praktik nyata untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan mengenali dan menangani dilema etika yang mungkin dihadapi di lapangan.
2. Pelatihan Etika Berkelanjutan
 - a. Organisasi profesi seperti Asosiasi Psikologi Klinis Indonesia (APKI) dapat menyelenggarakan program pelatihan etika berkelanjutan yang dapat diikuti oleh konselor kelompok profesional.
 - b. Pelatihan ini bertujuan untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan konselor terkait perkembangan terbaru dalam isu-isu etika konseling kelompok.

3. Pengembangan Sumber Daya Etika

Diperlukan pengembangan sumber daya etika yang mudah diakses oleh konselor kelompok, misalnya panduan praktis, booklet, atau platform daring yang berisi informasi terkini tentang kode etik, contoh kasus, dan alur penanganan potensi pelanggaran etika.

4. Peningkatan Peran Supervisor

Supervisor konselor kelompok perlu memiliki kompetensi yang kuat dalam isu-isu etika. Supervisor dapat berperan aktif dalam memandu konselor mengenali potensi pelanggaran etika, serta memberikan bimbingan untuk mengambil keputusan yang tepat sesuai kode etik.

5. Penguatan Budaya Etika dalam Organisasi

Lembaga atau organisasi yang menyediakan layanan konseling kelompok perlu membangun budaya etika yang kuat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip etika ke dalam kebijakan dan prosedur organisasi, serta menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan konfidensial bagi pihak yang ingin melaporkan potensi pelanggaran etika.

6. Peningkatan Kesadaran Anggota Kelompok

Memberikan edukasi singkat mengenai etika konseling kelompok kepada anggota kelompok pada sesi awal dapat membantu mereka memahami hak dan kewajiban mereka, serta pentingnya menjaga kerahasiaan dan membangun lingkungan kelompok yang saling menghargai.

Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, diharapkan konselor kelompok dapat menjalankan praktiknya secara profesional dan beretika, sehingga tercipta layanan konseling kelompok yang berkualitas dan bermanfaat bagi para anggotanya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Etika merupakan aspek fundamental dalam konseling kelompok. Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika penting untuk membangun kepercayaan, menciptakan lingkungan yang aman dan suportif, serta memastikan layanan konseling yang berkualitas dan bermanfaat bagi para anggotanya.

Beberapa prinsip etika utama dalam konseling kelompok meliputi kerahasiaan, kompetensi, integritas, keadilan, kepedulian, otonomi, informed consent, evaluasi dan penilaian, supervisi, dan dokumentasi.

Meskipun konselor berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip etika, terdapat beberapa potensi pelanggaran etika yang dapat terjadi, seperti pelanggaran kerahasiaan, ketidakkompetenan, konflik kepentingan, diskriminasi dan pelecehan, penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya informed consent, evaluasi dan penilaian yang tidak memadai, kurangnya supervisi, dan dokumentasi yang tidak akurat atau tidak lengkap.

Pencegahan dan penanganan pelanggaran etika merupakan tanggung jawab semua pihak yang terlibat, termasuk konselor, supervisor, organisasi profesional, dan anggota kelompok. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan etika, kode etik, supervisi, dan penciptaan budaya etika. Penanganan pelanggaran etika meliputi identifikasi masalah, investigasi, tindakan disiplin, dan pemulihan.

Meningkatkan pemahaman dan penerapan etika dalam konseling kelompok membutuhkan usaha kolektif dari berbagai pihak. Rekomendasi yang dapat dilakukan meliputi standarisasi pendidikan dan pelatihan etika, pelatihan etika berkelanjutan, pengembangan sumber daya etika, peningkatan peran supervisor, penguatan budaya etika dalam organisasi, dan peningkatan kesadaran anggota kelompok.

Dengan mengedepankan etika dalam konseling kelompok, terciptalah layanan yang aman, terpercaya, dan bermanfaat bagi para anggotanya, sehingga mereka dapat mencapai tujuan konseling dan berkembang secara optimal.

Saran

Pendidikan dan pelatihan etika konseling kelompok perlu diperkuat di institusi pendidikan dan program pelatihan berkelanjutan. Sumber daya etika yang mudah diakses dan budaya etika yang kuat di organisasi perlu dikembangkan. Edukasi singkat tentang etika perlu diberikan kepada anggota kelompok. Penelitian dan kajian tentang etika konseling kelompok di Indonesia, serta kolaborasi dan advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya etika dalam konseling kelompok, juga perlu dilakukan.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan etika konseling kelompok di Indonesia dapat terus berkembang dan menjadi landasan bagi praktik konseling yang profesional, beretika, dan bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Munro, R., Manthei, J. Small. (1989). *Counselling: The Skills of Problem-Solving. Psychology, Education*
- Abdillah, Kurniawati, M. (2021). Pelaksanaan Kode Etik Konselor dalam Hubungan Ganda di Sekolah. *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*, 12(1), 21-30. <https://doi.org/10.23887/XXXXXX-XX-0000-00>.
- Anonim. (2010). Etika dalam Konseling Kelompok. <http://ulankeyla.blogspot.co.id/2010/12/etika-dalam-konseling-kelompok.html>, diakses 19 maret 2024, 19;23 WIB
- Bertens, K. (2007). *Etika*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Corey, G., Corey, M. S., & Callanan, P. (2011). *Issues and Ethics in the Helping Professions*. United States of America: Brooks/Cole Cengage Learning. guidancekonseling.blogspot.com, diakses 20 Maret 2024,, 20:54 WIB
- Marjo, H.K., & Sodiq, D. (2022). Etika dan Kompetensi Konselor Sebagai Profesional (Suatu Pendekatan Literatur Sistematis). *Jurnal Paedagogy*, 9(1), 86-93. doi:<https://doi.org/10.33394/jp.v9i1.4512>.
- Robert L. Gibson dan Marianne H. Mitchell. (2011). *Introduction to Counseling and Guidance*, Translated by Yudi Santoso, dkk., (ed.), Jakarta: Pustaka Belajar
- Sujadi, Eko. (2018). Kode Etik Profesi Konseling serta Permasalahan dalam Penerapannya. *Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 14(2): 69-77.
- Syamila, Diana. (2022). Etika Profesi Bimbingan dan Konseling: Konseling Kelompok Online dan Asas Kerahasiaan. *Jurnal Paedagogy*, 9(1):116